



Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan (berdiri di panggung, depan kanan), didampingi Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Santosa Asrori (berdiri di panggung, depan kiri), saat meluncurkan Layanan Konsultasi Pendidikan di Kelurahan Wirobrajan, Rabu (16/4).

► KEBIJAKAN PEMERINTAH

Okupansi Merosot, PHRI Minta Relaksasi Pajak

UMBULHARJO—Pengusaha perhotelan di Kota Jogja meminta relaksasi pajak. Hal ini tak lepas dari rendahnya okupansi atau tingkat hunian hotel di Jogja pada momentum libur Lebaran 2025.

Afif Annissa Karin
afif@harianjogja.com

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryno, mengatakan tingkat hunian hotel di Jogja pada libur lebaran 2025 merosot jika dibandingkan momen yang sama di tahun sebelumnya.

Berdasar data PHRI DIY, okupansi hotel hanya mencapai 62,8% pada periode 30 Maret-7 April 2025. Kondisi serupa tak hanya terjadi di DIY, tetapi merata di daerah lainnya. Misalnya di Solo yang okupansinya hanya mencapai 55,8%; Jawa Tengah sebesar 58%; dan Jawa Timur sebesar 60%. Untuk itu, Deddy meminta keringanan kepada Pemkot Jogja utamanya dalam hal relaksasi pajak. Sebab, pada kondisi

► Berdasar data PHRI DIY, okupansi hotel hanya mencapai 62,8% pada periode 30 Maret-7 April 2025.

► Opsi PHK terpaksa dipilih jika benar-benar kondisi okupansi tak membaik bulan depan.

saat ini pemasukan tak sebanding dengan biaya operasional.

"Ibaratnya kondisi sedang gelap dan mungkin belum tahu apakah bisa bertahan sampai bulan depan. Kami butuh masukan dan dukungan terhadap apa yang bisa meringankan kami," ujar Deddy di Balai Kota Jogja, Rabu (16/4).

Deddy menambahkan berbagai upaya ditempuh anggotanya untuk bisa terus bertahan, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemberhentian kontrak, hingga opsi pemutusan hubungan kerja (PHK). Opsi PHK terpaksa dipilih jika benar-benar kondisi okupansi tak membaik bulan depan. Untuk itu, dia sangat mengharapkan kebijakan Pemkot Jogja terkait relaksasi pajak, tagihan PDAM, ataupun tagihan

listrik hotel dan restoran. Dengan demikian, setidaknya industri hotel dan restoran bisa sedikit lebih memperpanjang umurnya. Deddy memastikan pihaknya selalu mendukung kebijakan yang dicanangkan Pemkot Jogja. Tak terkecuali soal penanganan sampah.

"Apa yang menjadi program Pemkot Jogja sudah pasti kami jalankan. *Guyub rukun* *sesarengan* dengan Pemkot untuk memajukan pariwisata. Tetapi mohon apa yang menjadi keresahan kami juga diperhatikan," katanya.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, meminta hotel dan restoran untuk membuat surat permohonan relaksasi pajak, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun pajak lainnya. Nantinya, Pemkot akan melakukan kajian terhadap permohonan tersebut sehingga diharapkan ada solusi.

Hasto berkomitmen sektor pariwisata akan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kota Jogja. Sebab, selama ini sektor pariwisata menyumbang PAD terbesar untuk Kota Jogja. Berbagai strategi juga akan ditempuh Pemkot Jogja untuk memastikan sektor pariwisata tetap tumbuh.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005